



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KPKNL
JAMBI

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED 2025

Untuk Periode Yang Berakhir Pada
31 Desember 2025



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jambi, 2 Februari 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kiki Nurman Setiawan
NIP 198405152006021006



TAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv
I. Laporan Realisasi Anggaran	vii
II. Neraca	viii
III. Laporan Operasional	ix
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	38
VI. Daftar Lampiran	39
Lampiran 1 Laporan dari Aplikasi Monsakti	
Lampiran 2 Memo Penyesuaian	
Lampiran 3 Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran	
Lampiran 4 Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Rekening Koran	
Lampiran 5 Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan	
Lampiran 6 Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan	
Lampiran 7 Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN	



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI

JALAN DR. SOETOMO NOMOR 17 JAMBI – 36113
TELEPON: 0741-22028, 7555130; FAKSIMILE: 0741-7550376

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 2 Februari 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kiki Nurman Setiawan
NIP 198405152006021006

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Audited Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7,848,574,822,- atau mencapai 98.81 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp7,943,425,000 Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp3,565,932,001 atau mencapai 75.68% dari alokasi anggaran sebesar Rp4,711,969,000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp15,739,752,532,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1,053,364,859,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14,686,387,673,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp858,030,993,-; dan Rp14,881,721,539,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7,851,542,518,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2,436,754,998,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp5,414,787,520,-. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2,940,000,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp5,414,787,520,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp13,362,415,061,- ditambah Surplus-LO sebesar Rp5,414,787,520,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar – Rp3,895,481,042,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14,881,721,539,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Perpajakan		-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	7.943.425.000	7.848.324.822	98,80%	6.917.608.494
Penerimaan Hibah		-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		7.943.425.000	7.848.324.822	98,80%	6.917.608.494
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai		-	-	-	-
Belanja Barang	B.3	2.456.946.000	2.087.417.701	84,96%	2.093.194.410
Belanja Modal	B.4	2.255.023.000	1.478.514.300	65,57%	498.807.772
JUMLAH BELANJA		4.711.969.000	3.565.932.001	75,68%	2.592.002.182

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	2.907.801	1
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	856.066.118	1.081.309.113
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.5	-	-
Persediaan	C.6	194.390.940	58.961.075
Jumlah Aset Lancar		1.053.364.859,0	1.140.270.189,0
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.7	8.534.760.000	8.246.160.000
Peralatan dan Mesin	C.8	4.168.739.375	3.974.992.025
Gedung dan Bangunan	C.9	6.175.257.512	5.139.069.812
Aset Tetap Lainnya	C.10	1.923.900	1.923.900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	- 4.194.293.114	- 4.046.325.813
Jumlah Aset Tetap		14.686.387.673	13.315.819.924
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.12	-	-
JUMLAH ASET		15.739.752.532,0	#####
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.13	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	1.093.365.156,0	1.093.365.156,0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.15	309.896	309.896
Utang yang Belum Ditagihkan	C.16	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.17		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.093.675.052,0	1.093.675.052,0
JUMLAH KEWAJIBAN		1.093.675.052,0	1.093.675.052,0
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	14.646.077.480	13.362.415.061
JUMLAH EKUITAS		14.646.077.480	13.362.415.061
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.739.752.532	14.456.090.113

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	7.851.542.518	6.888.748.272
JUMLAH PENDAPATAN		7.851.542.518	6.888.748.272
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	17.673.935	85.480.401
Beban Barang dan Jasa	D.3	1.061.328.709	1.056.700.647
Beban Pemeliharaan	D.4	462.734.055	365.258.890
Beban Perjalanan Dinas	D.5	409.925.512	570.530.990
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	485.092.787	433.147.666
JUMLAH BEBAN		2.436.754.998	2.511.118.594
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		5.414.787.520	4.377.629.678
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.7		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	3.804.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	3.804.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	(864.000)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	864.000
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	2.940.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		5.414.787.520	4.380.569.678
SURPLUS/DEFISIT LO		5.414.787.520	4.380.569.678

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	13.362.415.061	13.286.626.695
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	5.414.787.520	4.380.569.678
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	(3.895.481.042)	(4.304.781.312)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1.519.306.478	75.788.366
EKUITAS AKHIR	E.4	14.881.721.539	13.362.415.061

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi

Dasar Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penyusunan Laporan keuangan KPKNL Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK-177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. KPKNL Jambi mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPKNL Jambi berkomitmen dengan visi ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di wilayah kerja KPKNL Jambi.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
- Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.

- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.2. Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Jambi TA 2025 dan Pengungkapan Capaian Output Program Prioritas Nasional Tahun 2025

- Secara keseluruhan KPKNL Jambi mampu memenuhi target kinerja di sepanjang TA 2025. Pemenuhan capaian kinerja pada 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Jambi, adapun NKO yang diperoleh KPKNL Jambi pada Audited Tahun 2024 yakni 114,86%.

NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL JAMBI TAHUN 2024

Kode SS /IKU		Sasaran Strategis / IKU (Bobot)	Target Y	Target (Desember)	Realisasi (Desember)	Target s.d (Desember)	Realisasi s.d (Desember)	Capaian (Desember)	Capaian s.d (Desember)
	Stakeholder Perspektif (30%)								111.55
	1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							111.55
	1a-CP	Indeks integritas	100	100	105.32	100	105.32	105.32	105.32
	1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	121.57	100	121.57	120	120
	Customer Perspektif (20%)								115.67
	2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							111.34
	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	115.32	100	115.32	115.32	115.32
	2b-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	100	100.98	100	100.98	100.98	100.98

2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	100	128.44	100	128.44	120	120	
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa								120
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	98.2	77	97.325			120
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	94.06	74	91.8175			120
Internal Process Perspektif (25%)									115.13
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif								110.26
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100	100	100.52	100	100.52			100.52
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100	100	120	100	120			120
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif								120
5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	70	105.9	70	107.1			120
5b-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	100	127.73	100	127.73			120
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80	80	150	80	150			120
Learning and Growth Perspektif (25%)									117.95
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif								120
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	120	100	120			120
6b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80	80	120	80	120			120
6c-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	120	100	120			120
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif								115.9
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	111.79	100	111.79			111.79
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	110	80	110			120

8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif						117.95
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	94.36	80	94.36	117.95
NILAI KINERJA ORGANISASI						114.87	114.87

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Periode pelaporan tahun berjalan SAI KPKNL Jambi menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terdiri dari beberapa modul terintegrasi untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan dari sisi Keuangan maupun dari sisi BMN.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. **Basis akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan **basis kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan

pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi memiliki DIPA untuk tahun 2025, sebagai berikut:

Uraian	2025	
	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.329.546.000	2.456.946.000
Belanja Modal	2.190.023.000	2.255.023.000
Jumlah Beban	4.519.569.000	4.711.969.000

Sumber : Monsakti-Laporan Tambahan-Laporan Realisasi Anggaran Belanja

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7,848,324,822,- atau 98,8% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp7,943,425,000,- Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	50,000,000	0	0	0	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	719,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	50,719,000	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Pertbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4,201,200,000	6,189,718,964	0	6,189,718,964	147.33
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	3,686,413,000	1,601,734,950	0	1,601,734,950	43.45
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	5,093,000	56,870,908	0	56,870,908	1116.65
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	7,892,706,000	7,848,324,822	0	7,848,324,822	99.44
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	7,943,425,000	7,848,324,822	0	7,848,324,822	98.8
	JUMLAH PENDAPATAN	7,943,425,000	7,848,324,822	0	7,848,324,822	98.8

Sumber : Monsakti-Laporan Tambahan-LRA Pendapatan menurut Akun

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Audited Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3,565,932,001,- atau 75,68% dari anggaran belanja sebesar Rp Rp, 4711,969,000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Realisasi
Pendapatan
Rp7,848,324,822

Realisasi Belanja
Negara
Rp3,565,932,001

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	0%
Belanja Barang	2.456.946.000	2.087.417.701	
Belanja Modal	2.255.023.000	1.478.514.300	
Total Belanja Kotor	4.711.969.000	3.565.932.001	75,68%
Pengembalian	0	0	0%
Jumlah	4.711.969.000	3.565.932.001	75,68%

Sumber : Monsakti-Laporan Tambahan-Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Barang

B.3 Belanja Barang

Rp 2,087,417,701,-

Realisasi Belanja Barang TA 2025 adalah sebesar Rp2,087,417,701,-

Belanja Barang TA 2025

URAIAN	Realisasi TA 2024
Belanja Barang Operasional	932.253.109
Belanja Barang Non Operasional	121.717.850
Belanja Barang Persediaan	152.302.800
Belanja Jasa	8.484.375
Belanja Pemeliharaan	462.734.055
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	409.925.512
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
Jumlah Belanja Kotor	2.087.417.701
Pengembalian Belanja	-
Jumlah Belanja 52	2.087.417.701

Sumber : Monsakti-Laporan Tambahan-Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Belanja Modal

B.4 Belanja Modal

Rp1,478,514,300

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Audited TA 2025 adalah sebesar Rp1,478,514,300,-.

Belanja Modal TA 2025

URAIAN	Realisasi TA 2024
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.726.600
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.324.787.700
Jumlah Belanja	1.478.514.300

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp153.726.600,-

B.4.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Audited TA 2025 adalah sebesar Rp153.726.600,- , dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Belanja Modal TA 2025

Pagu Revisi	Pagu Revisi	Realisasi TA 2025
000199. CCTV Rumah Dinas	Rp 1.400.000	Rp 1.100.000
000200. AC Split 0,5PK	Rp 20.100.000	Rp 20.100.000
000201. Tempat Tidur	Rp 14.700.000	Rp 14.400.000
000211. LCD Projector A	Rp 11.400.000	Rp 10.400.000
000212. CCTV A	Rp 10.300.000	Rp 9.950.000
000213. Meja Konsultasi A	Rp 8.000.000	Rp 7.548.600
000214. Locker A	Rp 21.200.000	Rp 14.196.000
000218. AC SPlit 1 PK	Rp 9.600.000	Rp 9.020.000
000219. AC SPlit 1/2 PK	Rp 3.700.000	Rp 3.606.000
000220. Microphone Set	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000
000217. Uninterruptible	Rp 9.390.000	Rp 7.440.000
000177. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	Rp 56.000.000	Rp 54.066.000
Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp 167.790.000	Rp 153.726.600

Sumber : Sakti-Lap Fa Detail Basis Kas Desember 2025

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA (AUDITED)

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp2,907,801,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,907,801,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025

	Keterangan	Saldo
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas:	
	Biaya Administrasi PPN	Rp 2.907.801
	Jumlah A	Rp 2.907.801

Sumber : LPSK pada Bendahara Penerimaan (Poin A) dan NERACA 31 Desember 2024

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp856,066,118,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025

	Keterangan	Saldo
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak Ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak :	
	Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 520.453.637
	Hak Penyerah Piutang Yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 5.188.146
	Uang Jaminan yang Belum Diambil	Rp 330.289.394
	Uang Jaminan yang Belum Disetor Kembali	
	Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	
	Lain-lain Lelang	
	Lain-lain Piutang	Rp 134.941
	Jumlah B	Rp 856.066.118

Sumber : LPSK pada Bendahara Penerimaan (Poin B dan C) dan NERACA 31 Desember 2025

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp
Rp856,066,118,-

Piutang Bukan Pajak **C.4 Piutang Bukan Pajak**

Rp0

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2024

C.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

Rp0

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2025

Persediaan

C.6 Persediaan

Rp194,390,940

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp194,390,940,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024

Jenis	2025	2024
Barang Konsumsi	194.390.940	58.961.075
Barang Untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	194.390.940	58.961.075

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2025

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

C.7 Tanah

Rp8,534,760,000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8,534,760,000,-

Rincian Tanah TA 2024

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	1093 m2	Jl. Sungai Putri, Kec. Telanaipura	3.583.449.000
2	111m2	Lrg. Barokah , Simpang III Sipin	288.600.000
3	716 m2	Jl. Dr. Sutomo No.17, Kec. Pasar Jambi	4.662.711.000
Jumlah			8.534.760.000

Tanah seluas 716 m2 berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 17, Jambi digunakan sebagai lahan gedung kantor KPKNL Jambi. Tanah seluas 1.093 m2 berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II di Jl. Sungai Putri, Telanaipura, Kota Jambi merupakan lahan kompleks rumah dinas jabatan KPKNL Jambi. Tanah seluas 111m2 di Lrg Barokah, Simpang III Sipin digunakan sebagai lahan untuk rumah dinas golongan II tipe D

Peralatan dan

C.8 Peralatan dan Mesin

Mesin

Rp4,168,739,375

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Intrakomptabel per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4,168,739,375,-

Rincian Peralatan dan Mesin TA 2025

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	3.974.992.025
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Transfer Masuk	555.039.800
Mutasi kurang:	
Penghentian dari penggunaan	(361.292.450)
Saldo per 31 Desember 2025	4.168.739.375

Sumber: Monsakti-Laporan BMN-Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel dan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel 31 Desember 2025

Gedung dan

C.9 Gedung dan Bangunan

Bangunan

Rp6,175,257,512

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6,175,257,512. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas gedung dan bangunan ini selama TA 2025.

Sumber: Monsakti-Laporan BMN-Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel 31 Desember 2025 – Audited

*Aset Tetap
Lainnya
Rp1.923.900*

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 adalah Rp1.923.900. Aset tetap tersebut berupa buku lainnya. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini selama TA 2025.

Sumber: Monsakti-Laporan BMN-Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel 31 Desember 2025 - Audited

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp4,046,325,813).*

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah (Rp4,046,325,813). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2024

Aset Lain-Lain Rp0

C.12 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2024

*Uang Muka dari
KPPN
Rp0,-*

C.13 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,-. Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp1.093.365.156,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.093.365.156,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian utang kepada pihak ketiga pada KPKNL Jambi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga 2025

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang Kepada Pihak Ketiga	1.520.646.085	
Jumlah	1.532.234.149	

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2025 dan Kertas Kerja BYMHD

Pendapatan

C.15 Pendapatan Diterima di Muka

Diterima di Muka

Rp309,896,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp 309,896,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2025

Utang yang Belum

C.16 Utang yang Belum Ditagihkan

Ditagihkan

Rp0,-

Kewajiban yang masih harus dibayar dan belum ditagih oleh pihak ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- karena terdapat belanja yang belum didetailkan berupa persediaan barang konsumsi. Namun telah dilakukan pendetailan.

Utang Jangka

C.17 Utang Jangka Pendek Lainnya

Pendek Lainnya

Rp0

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

C.18 Ekuitas

Ekuitas

Rp 13.362.415.061,-

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 13.362.415.061,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-NERACA 31 Desember 2024

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

Rp4.27.195.804

2025 adalah sebesar Rp4.27.195.804,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025

URAIAN	2025	2024
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	3.770.549.000	3.511.149.077
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.431.392.000	1.198.144.278
Pendapatan Biad Pengurusan Piutang Negara	5.093.000	8.404.504
Pendapatan Jasa Lainnya	0	26.817.568
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Sewa Kantin kontrak no. PRJ-001/KNL04.01/2023)	1.194.000	719.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	188.133.000	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	482.039
Jumlah	5.396.361.000	4.745.716.466

Sumber : Monsakti-Rincian Laporan Operasional (Akun)-1123 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2025 adalah Rp85.480.401,- Beban

Beban Persediaan

Rp85.480.401,-

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025

URAIAN	Tahun 2024
Beban Persediaan Konsumsi	85.480.401
Beban Persediaan Lainnya	-
Jumlah	85.480.401

Sumber : Monsakti-Rincian Laporan Operasional (Akun)-1212 Beban Persediaan

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Audited Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.056.700.647,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang

dan Jasa

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

Rp1.056.700.647,-

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024
Beban Keperluan Perkantoran	639.757.047
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	42.177.500
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86.994.000
Beban Barang Operasional Lainnya	30.895.710
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID	
Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.210.000
Beban Honor Output Kegiatan	19.275.000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	
Beban Langganan Listrik	106.782.702
Beban Langganan Telepon	10.520.835
Beban Langganan Air	4.045.600
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.922.920
Belanja Jasa Profesi	600.000
Beban Bahan	79.719.333
Beban Aset Ekstrakomptabel	1.800.000
Jumlah	1.056.700.647

Sumber : Monsakti-Rincian Laporan Operasional (Akun)-1213 Beban Barang dan Jasa

Beban

Pemeliharaan

Rp365.258.890

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2025 adalah sebesar Rp365.258.890. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2025 adalah sebagai berikut.

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2025
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	226.636.068
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.622.822
Jumlah	365.258.890

Sumber : Monsakti-Rincian Laporan Operasional (Akun)-1214 Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan

Dinas

Rp570.530.990,-

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2025 adalah sebesar Rp570.530.990,-.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2025
Beban Perjalanan Dinas Biasa	512.042.990
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.488.000
Jumlah	570.530.990

Sumber : Monsakti-Rincian Laporan Operasional (Akun)-1215 Beban Perjalanan Dinas

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp433.147.666,-

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2025 adalah sebesar Rp433.147.666,- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN	Tahun 2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	310.170.339
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	122.977.327
Beban Penyusutan yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-
Jumlah Beban Penyusutan	433.147.666

Sumber : Monsakti-Rincian Laporan Operasional (Akun)-1221 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp864.000

D.7 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan non operasional lainnya yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Nilai Beban Kegiatan Non Operasional sejumlah Rp864.000,-

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024

URAIAN	Tahun 2024
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	864.000
Surplus	(864.000)

Sumber : Monsakti-Rincian Laporan Operasional (Akun)-2131 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan 2132 Beban dari Kegiatan Non Operasional; Lainnya

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp14,881,721,539,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14,881,721,539,-

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Audited

Surplus LO
Rp0

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,-. Defisit LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Audited

Transaksi Antar
Entitas
Rp0

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas TA 2025

URAIAN	Tahun 2025
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Diterima dari Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Jumlah	-

Sumber : Monsakti-Laporan Utama-Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025

Ekuitas Akhir

Rp14,881,721,539,-

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14,881,721,539,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi Nomor KEP-109/KNL.0401/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Darnadi
Pejabat Pembuat Komitmen	: Muhammad Romi Kurniawan
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Azmi Mubarak (KEP-119/KNL.0401/2022)
Bendahara Pengeluaran	: Muslika Anindya Putri (KEP-158/KNL.0401/2024)

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Kiki Nurman Setiawan
Pejabat Pembuat Komitmen	: Muhammad Romi Kurniawan (KEP-109/KNL.0401/2024)
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Azmi Mubarak (KEP-158/KNL.0401/2024)
Bendahara Pengeluaran	: Muslika Anindya Putri (KEP-158/KNL.0401/2024)

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Laporan dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 2	Memo Penyesuaian
Lampiran 3	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran dan Rekening Koran
Lampiran 4	Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan dan Rekening Koran
Lampiran 5	Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan
Lampiran 6	Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
Lampiran 7	Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN

LAMPIRAN 1

LAPORAN DARI APLIKASI MONSAKTI

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (537873) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:23 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	2,907,801	1	2,907,800	290,780,000.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	856,066,118	1,081,309,113	(225,242,995)	(20.83)
Persediaan	194,390,940	58,961,075	135,429,865	229.69
JUMLAH ASET LANCAR	1,053,364,859	1,140,270,189	(86,905,330)	(7.62)
ASET TETAP				
Tanah	8,534,760,000	8,246,160,000	288,600,000	3.50
Peralatan dan Mesin	4,168,739,375	3,974,992,025	193,747,350	4.87
Gedung dan Bangunan	6,175,257,512	5,139,069,812	1,036,187,700	20.16
Aset Tetap Lainnya	1,923,900	1,923,900	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,194,293,114)	(4,046,325,813)	(147,967,301)	3.66
JUMLAH ASET TETAP	14,686,387,673	13,315,819,924	1,370,567,749	10.29
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	572,628,450	211,336,000	361,292,450	170.96
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(572,628,450)	(211,336,000)	(361,292,450)	170.96
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	15,739,752,532	14,456,090,113	1,283,662,419	8.88
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	858,030,993	1,093,365,156	(235,334,163)	(21.52)
Pendapatan Diterima Dimuka	0	309,896	(309,896)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	858,030,993	1,093,675,052	(235,644,059)	(21.55)
JUMLAH KEWAJIBAN	858,030,993	1,093,675,052	(235,644,059)	(21.55)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	14,881,721,539	13,362,415,061	1,519,306,478	11.37
JUMLAH EKUITAS	14,881,721,539	13,362,415,061	1,519,306,478	11.37
JUMLAH EKUITAS	14,881,721,539	13,362,415,061	1,519,306,478	11.37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15,739,752,532	14,456,090,113	1,283,662,419	8.88

Keterangan :
FINAL

Jambi, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI 537873

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 11:23 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	7,943,425,000	7,848,324,822	(95,100,178)	98.80	5,396,361,000	6,917,608,494	1,521,247,494	128.19
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,943,425,000	7,848,324,822	(95,100,178)	98.80	5,396,361,000	6,917,608,494	1,521,247,494	128.19
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	7,943,425,000	7,848,324,822	(95,100,178)	98.80	5,396,361,000	6,917,608,494	1,521,247,494	128.19
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	4,711,969,000	3,565,932,001	(1,146,036,999)	75.68	2,690,788,000	2,592,002,182	(98,785,818)	96.33
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,456,946,000	2,087,417,701	(369,528,299)	84.96	2,181,050,000	2,093,194,410	(87,855,590)	95.97
3. Belanja Modal	2,255,023,000	1,478,514,300	(776,508,700)	65.57	509,738,000	498,807,772	(10,930,228)	97.86
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI 537873

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM
Tgl Cetak : 13/02/26 11:23 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	4,711,969,000	3,565,932,001	(1,146,036,999)	75.68	2,690,788,000	2,592,002,182	(98,785,818)	96.33
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Jambi, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KIKI NURMAN SETIAWAN
198405152006021006

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (537873) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAMBI

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:24 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	7,851,542,518	6,888,748,272	962,794,246	13.976
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	7,851,542,518	6,888,748,272	962,794,246	13.976
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	7,851,542,518	6,888,748,272	962,794,246	13.976
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	17,673,935	85,480,401	(67,806,466)	(79.324)
Beban Barang dan Jasa	1,061,328,709	1,056,700,647	4,628,062	0.438
Beban Pemeliharaan	462,734,055	365,258,890	97,475,165	26.687
Beban Perjalanan Dinas	409,925,512	570,530,990	(160,605,478)	(28.15)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (537873) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAMBI

Tgl Data : 13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:24 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	485,092,787	433,147,666	51,945,121	11.992
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,436,754,998	2,511,118,594	(74,363,596)	(2.961)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5,414,787,520	4,377,629,678	1,037,157,842	23.692
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	3,804,000	(3,804,000)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	3,804,000	(3,804,000)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(864,000)	864,000	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	864,000	(864,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	2,940,000	(2,940,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5,414,787,520	4,380,569,678	1,034,217,842	23.609
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	5,414,787,520	4,380,569,678	1,034,217,842	23.609

Keterangan :
FINAL

Jambi, 13 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KIKI NURMAN SETIAWAN
198405152006021006

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (1000) JAMBI

SATUAN KERJA : (537873) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAMBI

Tgl Data : 13/02/26 6:38 AM

Tgl Cetak : 13/02/26 11:28 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,362,415,061	13,286,626,695	75,788,366	0.57
SURPLUS/DEFISIT-LO	5,414,787,520	4,380,569,678	1,034,217,842	23.61
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,895,481,042)	(4,304,781,312)	409,300,270	(9.51)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,519,306,478	75,788,366	1,443,518,112	1,904.6 7
EKUITAS AKHIR	14,881,721,539	13,362,415,061	1,519,306,478	11.37

Keterangan :

FINAL

Jambi, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KIKI NURMAN SETIAWAN

198405152006021006

LAMPIRAN 2

MEMO PENYESUAIAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 No Dokumen : 12-007
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar Dimuka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Aset
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	1.706.000,00	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1.706.000,00

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Paundra Adi R
Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 No Dokumen : 12-006
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Dimuka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
V	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Aset
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Langganan Air	258.875,00	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		258.875,00

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Paundra Adi R
Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 No Dokumen : 12-005
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar Dimuka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☒	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Aset
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2.400.000,00	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		2.400.000,00

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Paundra Adi R
Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 No Dokumen : 12-004
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal - Jurnal Koreksi

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Dimuka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Aset
	Kas di Bendahara Pengeluaran	V	Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	9.661.800,00	
	K	521253	Belanja Gedung dan Bangunan Ekstrakomptabel		9.661.800,00

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Paundra Adi R
Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 No Dokumen : 12-003
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal - Jurnal Koreksi

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐ Pendapatan Diterima di Muka	☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja Dibayar Dimuka	☐ Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐ Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐ Penyisihan Piutang	☐ Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐ Penghapusan Piutang	☐ Transfer Masuk
☐ Penyusutan Aset	☐ Transfer Keluar
☐ Kas di Bendahara Penerimaan	☐ Reklasifikasi Aset
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran	☐ V Koreksi
☐ Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	444.537.589,00	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		444.537.589,00

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Paundra Adi R
Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 No Dokumen : 12-002
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Dimuka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
V	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Aset
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	2.907.800,00	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		2.907.800,00

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Paundra Adi R
Tanggal 31 Desember 2025



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Keuangan
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 Wilayah : Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung
 Satuan Kerja : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 No Dokumen : 12-001
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : Tahun 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar Dimuka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
V	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Aset
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2.907.800,00	
	K	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara		2.907.800,00

Dibuat Oleh:
Kepala Subbagian Umum

Disetujui Oleh:
Kepala Kantor

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Kiki Nurman Setiawan
Tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik
Paundra Adi R
Tanggal 31 Desember 2025



LAMPIRAN 3

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING KORAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Provinsi/Kabupaten/Kota : (10.51) JAMBI / KOTA JAMBI

Satuan Kerja : (537873) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI

Alamat dan No Telp : Jalan Dr Soetomo Nomor 17 Jambi , 074122028

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537873/2025

Tahun : 2025

KPPN : (012) Jambi

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00227/SSP/537873/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	36.697.800,00	172.713.771,00	209.411.571,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	36.697.800,00	172.713.771,00	209.411.571,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	36.697.800,00	102.886.171,00	139.583.971,00	0,00
	1. BP UP*)	36.697.800,00	46.448.500,00	83.146.300,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	54.342.000,00	54.342.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	2.095.671,00	2.095.671,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
KIKI NURMAN SETIAWAN

198405152006021006 198405152006021006

KOTA JAMBI, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



Ditandatangani secara elektronik
MUSLIKA ANINDYA PUTRI

NIP 200006082022012001

Dicetak pada tanggal 05 Januari 2026



LAMPIRAN 4

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN REKENING KORAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Provinsi/Kabupaten/Kot : (10.51) JAMBI / KOTA JAMBI
Satuan Kerja : (537873) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-015.09.2.537873/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (012) Jambi
Alamat dan No Telp : Jalan Dr Soetomo Nomor 17 Jambi , 074122028 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 858.973.918,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	2.849.322.479,00	246.707.659.339,00	248.698.007.900,00	858.973.918,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	2.849.322.479,00	246.707.659.339,00	248.698.007.900,00	858.973.918,00
B.	BP Selain Kas	2.849.322.479,00	246.707.659.339,00	248.698.007.900,00	858.973.918,00
	1. BP PNPB	0,00	4.105.923.776,00	4.105.923.776,00	0,00
	2. BP DPK	2.849.322.479,00	242.109.744.657,00	244.100.093.218,00	858.973.918,00
	3. BP Pajak	0,00	491.990.906,00	491.990.906,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	858.973.918,00
3.	Jumlah Kas	Rp	858.973.918,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	858.973.918,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	858.973.918,00
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	4.597.914.682,00
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	4.597.914.682,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	4.597.914.682,00
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	1.053.597.776,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.053.597.776,00
3. Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA JAMBI , 08 Januari 2026
Bendahara Penerimaan

KIKI NURMAN SETIAWAN
198405152006021006 198405152006021006

RISKY CHILDNADY LAKSONO
NIP 199908212021011005

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Dicetak pada tanggal,08 Januari 2026

LAMPIRAN 5

LAPORAN POSISI SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN SUMSEL, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI
Jalan Dr. Soetomo No.17 Jambi 36113
Telepon : (0741) 23980, 22028 Faksimili : (0741) 7550376

LAPORAN POSISI SALDO KAS (KARTAL DAN GIRAL) PADA BENDAHARA PENERIMAAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI

31 Desember 2025

No	Keterangan	Saldo 31 Desember 2025
A.	Dana Milik Pemerintah/DJKN yang belum disetorkan ke Kas Negara terdiri atas :	Rp -
	1. Biaya Administrasi PPN	Rp 2.907.800
	2. Bea Lelang	Rp -
	3. Jasa Giro setelah dikurangi pajak (Sebelum TNP)	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang BMN Milik KPKNL	Rp -
	5. Lain-lain (Wanprestasi & Biaya Kutipan Risalah Pengganti)	Rp -
	5a. Wanprestasi (Rp0,00)	
	5b. Biaya Kutipan Risalah Pengganti (Rp0,00)	
	6. PPh	Rp -
	Jumlah A	Rp 2.907.800
B.	Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak Ketiga Lainnya yang belum dipindah-bukukan/ditransfer ke Pihak yang berhak terdiri dari :	Rp -
	1. Hasil Bersih Lelang Milik BUMN atau Swasta	Rp -
	2. Hasil Bersih Lelang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang BUMN dan atau Swasta)	Rp -
	3. Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang	Rp -
	4. Hasil Bersih Lelang Barang Eksekusi KPKNL (Penyerah Piutang Instansi Pemerintah)	Rp -
	5. Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya	Rp -
	6. Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	Rp 520.453.637
	7. Hak Penyerah Piutang yang Belum Dipindahbukukan ke Penyerah Piutang	Rp 5.188.146
	8. Uang Jaminan Lelang yang Belum Diambil	Rp 330.289.394
	9. Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang	Rp -
	10. Lain-lain Lelang	Rp -
	11. Lain-lain Piutang	Rp 134.941
	Jumlah B	Rp 856.066.118
C.	Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	Rp -
D.	Dana yang berasal dari Kredit Nota dan Setoran yang tidak jelas	Rp -
	JUMLAH A+B+C+D	Rp 858.973.918

Mengetahui

Plt. Kepala Seksi Hukum dan Informasi



Ditandatangani secara elektronik

Indah  viana

NIP.19841112 200901 2 004

Jambi, 12 Januari 2026

Bendahara Penerima



Ditandatangani secara elektronik

Risky Childnady Laksono

NIP.19990821 202101 1 005

LAMPIRAN 6

KERTAS KERJA TELAAH

LAPORAN KEUANGAN

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (537873) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi
 Kode dan Nama UAPPAW : (1400) SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
 Kode dan Nama Eselon 1 : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Kode dan Nama K/L : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua! Saldo Awal	√	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua!	√	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√	
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		√
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√
6	Terdapat Aset Belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		√
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√

Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)			
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNB		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak

8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas ?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECHEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECHEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECHEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya

	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	V		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungn SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya

4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Jambi, 22 Juli 2024
Penelaah,

Ditandatangani secara elektronik
Azmi Mubarak
NIP 197907282000121003

Ditandatangani secara elektronik
Muslika Anindya Putri
NIP 200006082022012001

LAMPIRAN 7

BERITA ACARA REKONSILIASI

DENGAN KPPN

**(monsakti menu rekonsiliasi sakti
span)**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI
KPPN JAMBI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 537873 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 12/05/26 11:20

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,711,969,000	4,711,969,000	0
2	Belanja	3,565,932,001	3,565,932,001	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	7,943,425,000	7,943,425,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	7,848,324,822	7,848,324,822	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026

